

Analisis Pengaruh Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Sosial terhadap Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Di Mamuju Sulawesi Barat

Aras, Hamka Hakim, Mursalim Nohong
Universitas Terbuka
UPBJJ Majene
araskando19797@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Sosial terhadap penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya penyelenggaraan UGB yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perizinan dan transparansi pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik untuk mengetahui pengaruh variabel pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan PPNS berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyelenggaraan UGB, yang tercermin dari meningkatnya kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan perizinan, transparansi proses undian, serta perlindungan kepentingan masyarakat. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kurang optimalnya pemahaman penyelenggara terhadap sistem perizinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan PPNS sangat diperlukan guna mewujudkan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: Pengawasan, PPNS, Undian Gratis Berhadiah, Dinas Sosial, Tata Kelola Pemerintahan.

Abstract

This study aims to analyze the effect of supervision by Civil Servant Investigators (PPNS) of the Social Affairs Office on the implementation of Free Prize Draws (Undian Gratis Berhadiah/UGB) in Mamuju Regency, West Sulawesi Province. The background of this study is based on the persistence of UGB activities that do not fully comply with prevailing regulations, particularly regarding licensing procedures and transparency. This research employs a quantitative approach using a case study method. Data were collected through observation, questionnaires, and documentation, and analyzed using statistical analysis techniques to examine the effect of supervisory variables on the implementation of UGB. The results indicate that PPNS supervision has a positive and significant effect on the implementation of UGB, as reflected in improved compliance with licensing requirements, transparency of the draw process, and protection of public interests. Nevertheless, the

effectiveness of supervision is still constrained by limited human resources and insufficient understanding of the licensing system among organizers. The study concludes that strengthening PPNS supervision is essential to ensure the orderly, transparent, and accountable implementation of Free Prize Draws in accordance with the principles of good governance.

Keywords: Supervision, Civil Servant Investigator (PPNS), Free Prize Draws, Social Affairs Office, Good Governance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era reformasi birokrasi yang terus berkembang, penyelenggaraan pemerintahan tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk menerapkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu elemen kunci dalam manajemen pemerintahan adalah fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai penentu keberlangsungan dan kinerja organisasi pemerintahan.

Pengawasan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas, proses kerja, serta perbaikan sub-sistem organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara

optimal. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Aparatur dan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menegaskan pentingnya pengawasan melekat sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan merupakan suatu proses sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan kerja, mengukur hasil yang dicapai, membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan, serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan, agar pelaksanaan kegiatan tetap sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan (Robbins & Coulter, 2021).

Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap

kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran administratif maupun hukum, seperti penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Berhadiah, PPNS diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap penyelenggaraan UGB guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, transparansi pelaksanaan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Namun, dalam penyelenggaraan UGB di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ditemukan fenomena pengawasan terhadap kegiatan UGB belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari sebagian pihak penyelenggara UGB yang mengajukan izin secara mendadak, tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu 14 hari kerja sebelum pelaksanaan UGB. Meskipun demikian, penyelenggaraan UGB tetap dilaksanakan. Selain itu, beberapa pihak penyelenggara UGB juga melaksanakan kegiatan tanpa mengantongi Surat Keputusan izin dari Kementerian Sosial, meskipun secara administratif telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara. Peraturan Menteri

Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 secara tersirat menyatakan bahwa UGB dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin Menteri Sosial dan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, namun kenyataannya masih ada pihak penyelenggara yang mengabaikan hal ini.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah kurangnya pemahaman pihak penyelenggara UGB mengenai penggunaan sistem aplikasi perizinan secara daring. Selain itu, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju juga terbatas.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pengawas dan berpendidikan S1 sebanyak 2 orang serta jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berpendidikan S1 sebanyak 1 orang. Sehingga pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penyidik kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah. Akibatnya, tercatat 12 penyelenggaraan UGB di Kabupaten Mamuju tanpa izin dari Dinas Sosial, menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan oleh PPNS menjadi

sumber permasalahan utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengidentifikasi masalah utama yaitu masih lemahnya pengawasan Penyidik PNS yang mendapatkan kewenangan dari Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada kegiatan penyelenggaraan UGB di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Penyidik PNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada Kantor Dinas Sosial. Menurut Syafii (2011), keberhasilan pelaksanaan pengawasan dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Sosial terhadap penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di Mamuju, Sulawesi Barat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana pengaruh Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Sosial

terhadap Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah Di Mamuju, Sulawesi Barat ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial terhadap Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan penulis terhadap teori atau konsep baru yang berkaitan dengan Analisis Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; dan
2. Sumbangsih pemikiran dan bahan informasi bagi Instansi Dinas Sosial dalam rangka penyelenggaraan Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Undian

Secara yuridis, konsep undian di Indonesia masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, yang mendefinisikan undian sebagai kegiatan pemberian hadiah berupa uang atau barang melalui mekanisme undi yang hasilnya tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh peserta.

Istilah undian secara internasional dikenal sebagai lottery (Inggris) dan loterij (Belanda), yang secara konseptual mengandung unsur peluang (*chance*) dan probabilitas yang sama bagi setiap peserta. Kesamaan makna lintas bahasa ini menunjukkan bahwa undian pada dasarnya merupakan aktivitas yang bertumpu pada mekanisme keberuntungan (*random selection*).

Dalam perspektif hukum dan etika keagamaan kontemporer, undian dalam Islam dikenal dengan istilah *qur'ah*. Praktik *qur'ah* dipandang sebagai metode yang netral dan objektif untuk menghindari keberpihakan, selama tidak mengandung unsur *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), dan mudarat bagi pihak lain. Oleh karena itu, undian dapat dibenarkan secara etis dan normatif apabila digunakan untuk tujuan yang sah, seperti distribusi hak, promosi non-eksploitatif, atau kegiatan sosial.

Undian Gratis Berhadiah (UGB)

Undian Gratis Berhadiah (UGB) merupakan bentuk kegiatan promosi yang diselenggarakan tanpa memungut biaya tambahan dari peserta dan dikaitkan dengan pembelian atau penggunaan produk barang dan/atau jasa tertentu. Penyelenggaraan UGB secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Berhadiah. Regulasi ini menegaskan bahwa UGB bertujuan untuk promosi, tidak memungut biaya partisipasi di luar transaksi utama, serta wajib memperoleh izin dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dari perspektif manajemen dan kebijakan publik modern, undian berhadiah dipahami sebagai instrumen promosi dan komunikasi pemasaran yang sah sepanjang tidak menimbulkan unsur spekulatif, eksploitasi, maupun kerugian bagi konsumen. Selain itu, undian berhadiah juga dapat berfungsi sebagai sarana penggalangan dana sosial dan kegiatan kemanusiaan, selama pelaksanaannya berada dalam koridor hukum, etika, serta pengawasan pemerintah yang memadai.

Dengan demikian, UGB dapat dipahami sebagai aktivitas promosi yang legal dan dapat diterima secara sosial apabila diselenggarakan tanpa pungutan tambahan, memiliki tujuan yang jelas, memperoleh izin resmi, serta berada di bawah pengawasan aparat berwenang. Oleh karena itu, peran pengawasan pemerintah, khususnya melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), menjadi krusial dalam memastikan bahwa penyelenggaraan UGB tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan masyarakat.

Indikator Undian Berhadiah

Menurut Sutarso (2010), undian berhadiah adalah pemberian berupa barang, jasa, atau uang yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi pada perdagangan. Indikator undian berhadiah yang baik meliputi undian berhadiah menarik, proses undian bersifat transparan, adanya kesempatan memenangkan hadiah, waktu pelaksanaan undian berhadiah jelas, serta adanya kesempatan untuk mengikuti kembali program undian berhadiah di masa yang akan datang.

Konsep Analisis

Analisis merupakan aktivitas memilah, mengurai, dan membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian ditafsir makna dan kaitannya. Sebagai pendukung, Komaruddin (1994) mengemukakan analisis sebagai kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan. Unsur pokok analisis meliputi:

1. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.
2. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.
3. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat terhadap sebuah objek kajian.

Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam manajemen organisasi yang berperan penting dalam menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi

publik, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai mekanisme penjamin akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintahan.

Dalam perspektif manajemen modern, pengawasan dipandang sebagai instrumen strategis yang berfungsi mendukung pencapaian visi dan misi organisasi melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, pimpinan organisasi dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pelaksanaan kerja sejak tahap perencanaan, proses, hingga evaluasi akhir.

Dalam administrasi publik kontemporer, pengawasan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan langsung yang dilakukan secara tatap muka dan pengawasan tidak langsung melalui laporan, sistem informasi, serta indikator kinerja.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajerial yang esensial untuk menjamin terlaksananya seluruh rencana organisasi sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan, sekaligus sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan manajemen organisasi publik.

Jenis Pengawasan

Dalam literatur manajemen dan administrasi publik kontemporer, pengawasan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan waktu pelaksanaan, objek, subjek, serta metode pengumpulan informasi pengawasan (Robbins & Coulter, 2021; Daft, 2021).

1. Berdasarkan waktu pelaksanaan, pengawasan terdiri dari pengawasan preventif dan pengawasan represif.
2. Berdasarkan subjek pengawasan, terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
3. Berdasarkan cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, terdiri dari observasi personal, laporan lisan, laporan tertulis, dan pengawasan berdasarkan kekecualian.

Berdasarkan uraian di atas, pengawasan dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu proses pengendalian melalui penyidikan PNS Dinas Sosial terhadap kegiatan UGB yang dilaksanakan oleh penyelenggara agar berjalan sesuai rencana semula.

Syarat-syarat Pengawasan

Syarat-syarat pengawasan dikemukakan oleh Simbolon dalam Fitrianingrum (2015, p.1646) yaitu pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang, pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya, pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting, pengawasan harus objektif, pengawasan harus luwes (fleksibel), pengawasan harus hemat, dan pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

Indikator Pengawasan

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016, p.290) terdiri dari empat indikator yaitu menetapkan standar (*standards*), pengukuran (*measurement*), membandingkan (*compare*), dan melakukan tindakan (*action*).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki posisi strategis dan menentukan dalam sebuah organisasi. Unsur manusia memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga pengelolaan SDM secara optimal, terukur,

dan sistematis diperlukan untuk menciptakan SDM yang berkualitas.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan, dan “negeri” berarti negara atau pemerintah. Dengan demikian, PNS adalah individu yang bekerja pada instansi pemerintah atau Negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mendefinisikan PNS sebagai seseorang yang memenuhi syarat, diangkat oleh pejabat berwenang, disertai tugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap PNS memiliki kesempatan untuk meningkatkan karirnya sepanjang hasil dan perilaku kerja menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan, serta memberikan dampak positif terhadap pencapaian nilai-nilai dan tujuan organisasi. Pendekatan sistem manajemen kepegawaian saat ini lebih menekankan pada sistem pembinaan yang berbasis pada jabatan (*Position Based Personnel Management System*). Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi PNS, berdasarkan syarat-

syarat objektif tanpa diskriminasi golongan, agama, atau daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk selaku Penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam konteks pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB), PPNS mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan dan penyidikan jika terdapat pelanggaran tindak pidana, serta bekerja sama dengan instansi Kepolisian terhadap penyelenggaraan UGB yang telah memperoleh izin. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Berhadiah.

Dengan demikian, SDM sebagai penyidik PNS Dinas Sosial yang mendapatkan kewenangan dapat melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap penyelenggara UGB yang melakukan tindak pidana. Selain itu, penyidik PNS tersebut juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait,

termasuk kepolisian, yang berhubungan dengan penyelenggaraan UGB.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Menurut Abdurrahman dalam Syaifiie (2011) ada beberapa faktor yang dapat membantu pengawasan dan mencegah dari berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa, agama yang mendasari seseorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerja, dan kemandirian koordinasi dalam organisasi.

Selain hal tersebut, terdapat pula faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengawasan yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor informasi.

Hipotesis

1. Diduga pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di Kabupaten Mamuju.
2. Diduga terdapat salah satu variabel bebas yang dominan berpengaruh

signifikan terhadap Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di Kabupaten Mamuju.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan populasi sebanyak 84 pegawai yang merupakan jumlah keseluruhan pegawai Dinas Sosial serta sampel sebanyak 35 orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) OPD Instansi Pemerintah Kota Mamuju. Data hasil penelitian didapatkan melalui sumber data primer, data sekunder dan informan.

Instrument yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan catatan dokumentasi. Hasil dari perolehan data dari questioner kemudian dilakukan pengolahan data dengan prosedur uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan skala pengukuran variabel.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan terdiri dari:

1. Analisis statistik

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan tabel distribusi

frekuensi untuk menentukan persentase tanggapan responden atas skor yang diperoleh dengan menggunakan rumus Sugiyono (2010) sebagai berikut :

$$\text{Nilai skor} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Total skor}} \times 100\%$$

Berdasarkan jumlah responden yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 53 orang, maka jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $5 \times 35 = 175$, dan yang terendah yaitu $1 \times 35 = 35$.

2. Analisis regresi linear sederhana

Bentuk umum model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b X + e$$

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas Pengawasan (X), terhadap variabel tidak bebas Undian Gratis Berhadiah (Y) maka dilakukan uji F.

Variabel bebas (Pengawasan) berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap variabel tidak bebas (Undian Gratis Berhadiah). Variabel bebas (Pengawasan) berpengaruh sangat signifikan dan positif terhadap variabel tidak bebas (Undian Gratis Berhadiah).

Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan dengan derajat bebas (df) $(n - k - 1)$ dimana n

adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas. Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% dan $df = (n-1)$. Maka nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 5% dan derajat bebas $= (n-1)$, sehingga (Ghozali, 2010) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Jika F hitung > F tabel atau Sig. F < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yakni

secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel tidak bebas.

- b. Jika F hitung < atau Sig.F > 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yakni secara simultan variabel bebas berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap variabel tidak bebas.

HASIL PENELITIAN

Pengawasan PPNS

Tabel 5.5. Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan PPNS

| No | Tanggapan n | Pengawasan PPNS | | | |
|---------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Penetapan Standar | Pengukura n | Membandingka n | Melakukan Aksi |
| | | % | % | % | % |
| 1 | STS | 14.3 | 4.8 | 1.0 | 2.9 |
| 2 | TS | 54.3 | 21.9 | 7.6 | 14.3 |
| 3 | TT | 2.9 | 11.4 | 7.6 | 20.0 |
| 4 | S | 22.9 | 41.9 | 65.7 | 58.6 |
| 5 | SS | 5.7 | 20.0 | 18.1 | 4.3 |
| Jumlah | | 100 | 100 | 100 | 100.0 |

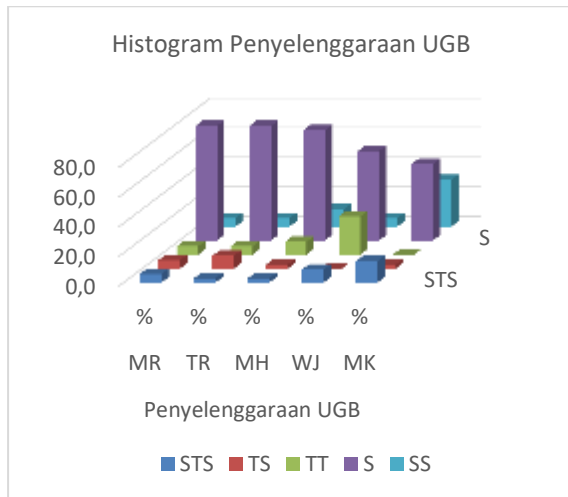
Sumber : Hasil Olah SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan Tabel 5.5 memperlihatkan tanggapan responden tentang pengawasan PPNS ditunjukkan oleh prosentase rata-rata 47,3% dengan

tanggapan Setuju (S) adanya pengawasan PPNS yang ketat terhadap pelaksanaan undian gratis berhadiah di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah

Hasil pengolahan data questioner melalui SPSS versi 25 dapat dilihat pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4. Histogram Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pembelajaran

Berdasarkan Gambar 5.4, terlihat bahwa tanggapan responden terhadap penyelenggaraan undian gratis hadiah di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju diperlihatkan dengan prosentase rata-rata sebesar 68,0% responden setuju.

Uji validitas data

Tabel 5.12. Hasil Uji Validitas Variabel Penyelenggaraan UGB (Y)

| N | Penyeleng | Nila | Nila | Sig | Ketera |
|---|-----------|------|------|-----|--------|
|---|-----------|------|------|-----|--------|

Tabel 5.13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

| o. | garaan | i R | i R | . | ngan |
|----|---------|-----------|------------|-----------|-------|
| | UGB (Y) | Hit | Tab | | |
| | | ung | el | | |
| 1. | Y1 | 0,8 55 | 0,3 246 | 0.0 00 | Valid |
| 2. | Y2 | 0,8 38 | 0,3 246 | 0.0 00 | Valid |
| 3. | Y3 | 0,7 45 | 0,3 246 | 0.0 00 | Valid |
| 4. | Y4 | 0,8 84 | 0,3 246 | 0.0 00 | Valid |
| 5. | Y5 | 0,5 56 | 0,3 246 | 0.0 00 | Valid |

Sumber : Hasil Olah SPSS versi 25, 2025

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas data dapat diukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha (a)*, nilai variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* hitung > *Cronbach's Alpha* Standar 0,6. Nilai alpha masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.13.

| No. | Variabel | Jumlah Item | Nilai Cronbach's Alpha | | Ket. |
|-----|---------------------|-------------|------------------------|---------|----------|
| | | | Cronbach's Alpha | Standar | |
| 1. | Pengawasan PPNS | 9 | 0,835 | 0,6 | Reliabel |
| 2. | Penyelenggaraan UGB | 5 | 0,795 | 0,6 | Reliabel |

Sumber : Hasil Oleha SPSS Versi 25, 2025

Uji asumsi klasik

1. Hasil uji normalitas data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*.

Berdasarkan hasil uji normalitas data residual dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25, diketahui nilai residual unstandardized dengan *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar $0,200 >$ dari nilai Alpha Standar $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas data residual adalah berdistribusi normal.

2. Hasil uji multikolinearitas data

Nilai tolerance variabel Pengawasan PPNS (X) $1,000 > 0,10$, dan nilai VIF $1.000 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel bebas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Data

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas data dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui

apakah model sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25, dan menggunakan uji Glejser, diketahui Nilai signifikansi (sig.) variabel Pengawasan PPNS (X) sebesar $0,058 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Autokorelasi Data

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 25, diketahui nilai Durbin Watson (DW) hitung sebesar 1.311 dan nilai dU dari dU tabel pada $k=3$ serta tabel signifikansi 5% ($0,05$) dengan jumlah sampel sebanyak $35 (n-2)$ adalah 1.5078 , maka nilai DW sebesar $1.311 < 1.5078$. Jadi Nilai DW $<$ dari batas dU dan $DW < (4-dU)$, yaitu $4-1.5078=2.492$. Jadi nilai DW $<$ dU $<$ $4-dU = 1.311 < 1.5078 < 2.492$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

1. Nilai F Hitung

Berdasarkan hasil analisis varian dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25, diketahui nilai F hitung variabel

Pengawasan PPNS (X), berpengaruh sangat signifikan terhadap Penyelenggaraan UGB (Y) di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju. Data hasil pengolahan SPSS versi 25 disajikan pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20. Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 243.247 | 1 | 243.247 | 41.399 | .000b |
| | Residual | 193.896 | 33 | 5.876 | | |
| | Total | 437.143 | 34 | | | |

a. Dependent Variable: UGB

b. Predictors: (Constant), Pengawasan

Sumber : Hasil Olah SPSS Versi 25, 2023

Hasil analisis varian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 41.399 > 4.121 pada alpha 0.05, derajat bebas (k-1) dan sampel 35 (n-2), dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0.000. Hasil analisis varian menunjukkan bahwa nilai F hitung 41.399 > nilai F tabel 4.121, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengawasan PPNS (X) secara simultan

berpengaruh sangat signifikan terhadap Penyelenggaraan UGB di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

2. Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil analisis varians, koefisien determinasi (R²) pada variabel Pengawasan PPNS berpengaruh sangat signifikan terhadap Penyelenggaraan UGB, dengan nilai pengaruh 0,556 atau 55,6%,

sedangkan sisanya 45,4% adalah faktor yang tidak terdapat pada penelitian ini.

3. Koefisien Korelasi (R)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh garis persamaan regresi yaitu : $Y = 4.427 + 0.450 (X) + e$. Hasil nilai koefisien korelasi (R) menjelaskan bahwa nilai 4.427 adalah nilai konstanta, jika nilai variabel X adalah 0, maka Penyelenggaraan UGB (Y) sebesar 4.427, dan nilai $b = 0.450(X1)$, menunjukkan bahwa variabel Pengawasan PPNS (X) berpengaruh sangat signifikan dan positif terhadap Penyelenggaraan UGB. Jika Pengawasan PPNS (X) ditingkatkan satu satuan maka Penyelenggaraan UGB akan bertambah sebesar 0.450 (X) skala satuan.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis varian pada uji F diketahui nilai F hitung 41.399 > nilai F tabel 2.030 pada taraf kepercayaan 5%. Hasil analisis varians ini menunjukkan bahwa Pengawasan PPNS (X) berpengaruh sangat signifikan terhadap Penyelenggaraan UGB di Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

PEMBAHASAN

Analisis Pengaruh Pengawasan PPNS Dinas Sosial terhadap Penyelenggara Undian Gratis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan PPNS berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan undian gratis berhadiah. Temuan ini memperkuat pandangan teori pengawasan klasik yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter, yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajerial yang memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktik penyelenggaraan UGB, pengawasan PPNS berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan masyarakat sebagai peserta undian.

Penelitian ini memperkuat temuan Harianto dan Saputra (2020) yang menyatakan pengawasan yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan pelaksana kebijakan. Kepatuhan tersebut terwujud dalam pemenuhan perizinan, transparansi undian, dan distribusi hadiah sesuai ketentuan Permensos No. 12 Tahun 2019. Selain itu, perspektif *good governance* dari Rahman dan Hidayat (2023) didukung, di mana pengawasan PPNS berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas kegiatan publik.

Namun demikian, temuan ini berbeda dengan Siregar dan Lubis (2021), yang menemukan pengawasan tidak signifikan akibat lemahnya kapasitas SDM dan kewenangan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh legitimasi kuat PPNS di Mamuju berdasarkan PP No. 43 Tahun 2012. Demikian pula, Pratama dan Wijaya (2022) mencatat pengawasan formalistik justru menurunkan efektivitas; oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan proporsional berbasis pembinaan dan edukasi hukum daripada penindakan semata.

Temuan juga sejalan dengan Putri dan Kurniawan (2023) mengenai keterbatasan jangkauan pengawasan akibat minimnya aparatur dan luasnya wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berpengaruh, pengawasan PPNS belum optimal menjangkau seluruh aspek UGB.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memiliki kesesuaian yang kuat dengan sebagian besar penelitian terdahulu, khususnya yang menekankan pentingnya pengawasan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan publik. Perbedaan dengan beberapa penelitian yang tidak sejalan dapat dijelaskan melalui perbedaan

konteks organisasi, kapasitas aparatur, serta karakteristik objek pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian pengawasan PPNS, khususnya dalam konteks penyelenggaraan undian gratis berhadiah di tingkat pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Sosial berperan krusial dalam menjamin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) di Kabupaten Mamuju tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Melalui tahap penetapan standar, pengukuran, perbandingan, serta tindakan korektif, pengawasan ini meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap perizinan, keterbukaan undian, dan pemberian hadiah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan PPNS tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang mendorong terciptanya kesadaran hukum bagi penyelenggara undian gratis berhadiah. Temuan penelitian ini memperkuat teori dan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa

pengawasan aparatur pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan publik, meskipun tantangan keterbatasan SDM dan koordinasi antarinstansi tetap ada.

Dengan demikian, pengawasan PPNS Dinas Sosial merupakan faktor kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat di Kabupaten Mamuju.

SARAN

1. Pemerintah daerah disarankan memperkuat fungsi PPNS Dinas Sosial melalui pelatihan teknis dan regulasi terkini untuk tingkatkan kepatuhan penyelenggara UGB.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi empiris mengenai peran pengawasan PPNS dalam tata kelola sosial-ekonomi daerah, termasuk kepatuhan hukum dan kepercayaan publik.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan variabel dengan memasukkan faktor lain yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan undian gratis berhadiah, penggunaan pendekatan

kualitatif atau metode campuran dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pengawasan PPNS di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2014). Management control systems (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Armstrong, M. (2020). Armstrong's handbook of human resource management practice (15th ed.). Kogan Page.
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, I. (2018). Manajemen kinerja: Teori dan aplikasi. Alfabeta.
- Hariato, & Saputra, A. (2020). Pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), 120–131. <https://doi.org/10.31289/jab.v8i2.3491>
- Hidayat, R., & Prasetyo, E. (2022). Pengaruh pengawasan dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–156.

- <https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.5276>
- Nielwaty, E., Prihati, & Zuhdi, S. (2017). Pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 89–101.
- Novianita, & Rulandari. (2017). The effect of supervision and professionalism on staff performance. *Journal of Social Affairs*, 3(1), 55–64. <https://doi.org/10.31227/osf.io/8z4gk>
- Rahmawati, D., & Setiawan, A. (2019). Pengaruh pengawasan pimpinan terhadap kinerja pegawai organisasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 98–108. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4f8ka>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Republik Indonesia. (1954). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Sosial Nomor 14/A/HUK/2006 tentang Izin Undian.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.